

KH. Ahmad Bagdja:

“Perlu Aturan Normatif Hubungan NU dan Politik...”



Agenda besar apa yang hendak diusung dan diprioritaskan PBNU ke depan?

Secara singkat, saya kira ada empat program utama yang hendak dirumuskan di muktamar. *Pertama*, peningkatan pelayanan untuk umat yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan, yang ini mengindikasikan kesejahteraan ekonomi. *Kedua*, peningkatan pelayanan kesehatan. *Ketiga*, peningkatan pelayanan komunikasi antarsesama komponen NU yang demikian besar dan luas. *Keempat*, peningkatan pelayanan terhadap pengembangan pemikiran keagamaan. Istilah pelayanan digunakan di sini untuk lebih memberikan bobot. Tugas kepengurusan di NU adalah melayani kepentingan-kepentingan umat. Rinciannya akan disusun dalam bidang atau tim program Muktamar mendatang. Ini yang terkait dengan program. Sementara yang terkait dengan posisi dan peran kemasyarakatan NU, baik di tingkat nasional maupun

internasional, yang juga menjadi perhatian di tingkat nasional adalah mempertahankan dan mengembangkan kepercayaan tokoh atau umat beragama kepada NU, baik itu sesama umat Islam maupun non-muslim, yang selama ini kepercayaannya diberikan dalam bentuk terselenggaranya forum lintas agama. Ke depan itu akan kita kembangkan dalam bentuk-bentuk yang lebih operasional. Selain itu, kita ingin tetap menggalang kerja sama, khususnya dengan Muhammadiyah maupun kemitraan yang lain dalam upaya gerakan moral kebangsaan anti-korupsi. Di dunia internasional, kita akan menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan dalam konferensi internasional yang lalu yang mengundang berbagai tokoh muslim dunia dari 40 negara di mana NU dipercaya sebagai sekretariat pelaksana sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan atau kerja

sama kebudayaan. Dalam Mukhtamar mendatang, sebagian delegasi dari luar negeri peserta konferensi internasional itu, misalnya delegasi dari Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Australia, akan diundang. Tapi, seberapa jauh yang datang, kita lihat di Mukhtamar nanti.

Untuk peningkatan dalam berbagai bidang itu tadi, bukankan itu menuntut adanya perubahan manajemen pada tingkat pengurus. Terus apa yang akan dilakukan PBNU?

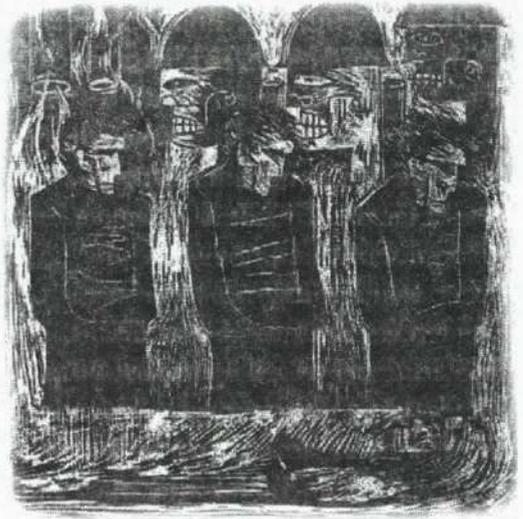
Yang tetap menjadi perhatian besar dari tuntutan dan perubahan masyarakat adalah bahwa ke depan NU akan kehilangan perannya apabila tidak berhasil meningkatkan fungsi dan efektifitas organisasi dan perangkatnya. Jadi, kelak ketika kita bersaing dalam perubahan-perubahan masyarakat, kalau kita tidak berhasil membenahi ini, saya kira kita akan kehilangan daya respons terhadap perubahan yang berlangsung dengan cepat. Karena itu, membangun institusi NU adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaan dasarnya adalah, kenapa perangkat NU yang kita miliki dan memiliki tugas konstitusional sebagai penyelenggara atau ujung tombak program tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Misalnya kita mempunyai Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, tapi kita tidak merasa puas dengan hasil yang dicapainya. Kita juga mempunyai Lembaga Dakwah NU, kita juga tidak berhasil untuk melakukan dakwah yang sesuai dengan tuntutan perkembangan yang sedang berlangsung. Masih

banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh usaha-usaha dakwah kita. Demikian juga, di bidang lain, misalnya, Banom sebagai perangkat organisasi, kita mempunyai Gerakan Pemuda Ansor, tapi kita tetap saja merasa kesulitan mencari kader-kader yang bisa mengelola organisasi secara lebih baik. Kita juga mempunyai IPNU, IPPNU, Fatayat, dsb. Masih banyak pertanyaan besar lainnya yang semestinya kita jawab. Jika tidak, maka kita hanya melihat NU sebagai organisasi yang namanya besar, tapi 'amalayah-nya tidak bisa segera dirasakan oleh masyarakat luas. Ini berarti, lama-kelamaan NU bisa ditinggal. Jadi, dari sisi pendekatan manajemen, saya kira usaha pertama dan prioritas adalah meningkatkan efektifitas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di NU. Efektifitas penting karena memang lembaganya ada tapi tidak efektif. Dalam aspek efisiensi kita ingin mengkaji kembali mana saja lembaga-lembaga yang wewenang dan tanggungjawabnya bisa lebih diciutkan atau diperkecil jumlahnya. Kita sekarang banyak memiliki lembaga, tapi di sisi lain ada keinginan untuk mendirikan kembali lembaga semisal Lesbumi, Pergunu, dan lembaga-lembaga lain yang hendak mewadahi potensi warga dengan mendirikan organisasi. Padahal kita tahu bahwa langkah untuk mengefektifkan potensi itu tidak seharusnya dilakukan dengan mendirikan wadah seperti itu. Itu mungkin perlu dikaji lebih dalam.

Lima tahun yang lalu, KH. Hasyim Muzadi juga sudah menjadikan pen-

jam'iyahan NU sebagai salah satu agenda besarnya. Tapi, hasilnya belum memuaskan. Terobosan apa yang bisa dilakukan NU ke depan?

Betul. Sejak muktamar yang lalu kita memiliki delapan program yang disusun dan dicanangkan. Pertama, *institutional building*, pembangunan institusi yang kuat masih jauh dari harapan. Kita baru bisa menghidupkan struktur statisnya, misalnya wilayah yang tadinya tidak efektif sekarang bisa relatif berjalan sebagaimana terjadi di luar Jawa. Sekarang cabang-cabangnya bisa lebih hidup dan komunikasinya jauh lebih baik. Tapi, itu semua masih jauh dari memadai. Meskipun itu merupakan keberhasilan dan ingin kita kembangkan lebih lanjut, maka perlu adanya upaya peningkatan pelayanan komunikasi sebagaimana saya sebutkan tadi. Saya pikir itu sangat penting. Misalnya, kita sekarang punya NU Online, namun secara operasional belum berfungsi secara maksimal. Menurut saya, terobosan ke depan adalah, pertama, harus ada pemikiran ulang mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan itu. Misalnya, di AD/ART kita tegaskan bahwa mekanisme pendirian cabang yang selama ini dasar pemikirannya terkait dengan administrasi pemerintahan (misalnya, wilayah di tingkat provinsi dan cabang di tingkat kabupaten atau kota), maka ke depan, secara bertahap, itu harus diimbangi dengan alternatif bahwa cabang juga dapat didirikan oleh jamaah di daerah tertentu yang mempunyai prestasi.



Misalnya mereka secara mandiri bisa mendirikan sekolah, panti asuhan, rumah sakit, atau mungkin balai pengobatan. Mereka-mereka yang mempunyai prestasi di masyarakat, di suatu daerah tertentu itu, secara organisatoris harus diakui dan pengakuannya diberikan dalam bentuk kewenangan untuk ikut memberikan suara dalam pengaturan organisasi, yaitu misalnya ia bisa menjadi cabang. Sehingga ke depan ada kriteria-kriteria konkret bahwa cabang juga bisa didirikan atas dasar prestasi warga di lingkungannya. Misalnya ada lima puluh atau seratus orang anggota yang memiliki dedikasi tinggi terhadap NU dengan mendirikan—misalnya—sarana-sarana sosial untuk kepentingan umum. Ini dilakukan demi mewadahi potensi yang efektif dalam struktur. Jadi, tidak hanya pendekatan administratif, tapi juga didasarkan pada prestasi yang dicapai.

Kedua, struktur kita, khususnya tingkat cabang sampai ke desa, sebagian

besar masih belum menyebar. Jadi, kita *mandeg* rata-rata hingga tingkat cabang. Atau di Jawa itu baru sampai pada tingkat kecamatan. Ke depan, prioritas perhatian pembangunan institutsi dan peran-perannya harus dari cabang ke bawah, dari cabang sampai ranting. Jadi, di sanalah akan kelihatan bahwa NU secara merata hidup dan menyebar di desa dan kecamatan. Sebab di sanalah basis-basis NU lebih nyata dan harus diurus. Ke depan, kesuksesasan membangun institusi itu juga harus ditandai dengan efektifitas ranting yang ada, MWC yang efektif, di samping lembaga-lembaga yang secara horizontal berhubungan dengan NU semisal banom, lembaga, dan lajnah.

Anda menyebutkan bahwa salah satu agenda penting NU adalah bagaimana NU ikut serta mengawal problem-problem kebangsaan. Selama ini ada penilaian bahwa PBNU tidak begitu mengikuti secara cepat perkembangan-perkembangan yang terjadi di tingkat nasional. Misalnya, dalam kasus perkembangan politik tertentu, atau kejadian bom, dan semacamnya. Kenapa kerap terjadi kelambatan?

Saya kira itu disebabkan oleh faktor pemberitaan. Bahwa sikap dan langkah yang dilakukan NU sebenarnya tidak terlalu tertinggal dibandingkan dengan respons masyarakat atau kelompok-kelompok agama yang lain. Bahkan secara lebih konkret, khususnya masalah bom dan masalah terorisme, itu lebih banyak kita lakukan dengan langkah-langkah Pak

Hasyim yang, misalnya, melakukan pernyataan sikap atau memberikan pemikiran-pemikiran dalam menyikapi kejadian-kejadian. Ini sering dilakukan, misalnya, dengan duta-duta besar, atau melakukan kunjungan-kunjungan ke negara-negara Eropa, Amerika, dan sebagainya. Dalam kasus Bom Bali misalnya kita mengalami sendiri tekanan yang sangat berat terhadap dunia Islam, khususnya Islam di Indonesia. Oleh karena itu, NU serta-merta mengambil langkah aktif untuk menjelaskan pada negara Barat, khususnya Amerika dan Australia, bahwa umat Islam Indonesia tidak bisa dikategorikan sebagai sarang teroris. Kita berupaya meyakinkan mereka. Kita berkali-kali berkunjung ke Amerika (lebih dari empat kali), kemudian ke negara-negara Eropa (saya ikut juga ke sana), apalagi ke negara Timur Tengah. Kesan yang diperoleh cukup positif. Ternyata mereka keliru memahami Islam Indonesia, dan mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan besar Islam Indonesia, yaitu NU, yang memiliki pemikiran yang moderat, yang memiliki sikap keislaman yang lebih toleran. Saya kira itu dipahami oleh mereka, sehingga ketika kita mengajukan pertanyaan pada mereka, kenapa para pengamat, para peneliti, dan institusi yang melakukan kajian Islam melihat Islam sebagai gerakan, bukan Islam sebagai ajaran? Karena, sebagai ajaran, Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan, dan sebagainya. Ini menarik buat mereka. Jadi, saya kira sikap yang kita lakukan justru langkah yang

lebih konkret dan positif, ketimbang kita hanya menyebarkan pernyataan-pernyataan yang lebih banyak bisa dibaca. Jadi, saya kira ke depan kita tetap akan memberikan perhatian yang penuh kepada bagaimana menarik perhatian masyarakat dunia mengenai perkembangan Islam di Indonesia, bahkan kita akan mengajak masyarakat Islam dunia untuk juga memberikan sikap yang bisa dipahami oleh dunia Barat agar Islam tidak dipojokkan sebagai kekuatan dunia yang berhadapan dengan dunia Barat. Saya kira ini merupakan sebuah pekerjaan besar dan menuntut kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah.

Orang lain melihat bahwa NU sebagai organisasi besar sering diharapkan kontribusinya dalam soal menyikapi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat umum. Misalnya masalah kebijakan listrik, pengelolaan air, hutan, dan sebagainya. Untuk yang akan datang, bagaimana peran NU di dalam soal masalah ammah seperti ini?

Sesungguhnya, dari mulai rancangan UU pendidikan, air, masalah wakaf, masalah haji, tenaga kerja, itu semua kita bicarakan dan kita salurkan melalui kader-kader NU yang ada di partai politik, khususnya yang ada di DPR. Itu tertulis, termasuk saya. Saya memberikan rancangan UU pendidikan, tenaga kerja, wakaf, masalah air kepada beliau-beliau yang berjuang di bidang legislasi. Adapun bagaimana tindak lanjutnya, ini yang belum ada evaluasinya. Saya kira per-

hatian kita selama ini masih terbatas di bidang pemikiran-pemikiran yang memang layak untuk disampaikan.

Sementara tindakan-tindakan yang perlu dilakukan secara langsung di lapangan atau gerakan-gerakan yang ada di bawah sebenarnya belum kita lakukan. Yang saya ketahui, kita telah memberikan amanat pada anggota-anggota DPRD dari NU, khususnya dalam penentuan APBD, hendaknya lebih diorientasikan pada pemberdayaan masyarakat. Ke depan, upaya semacam ini lebih dipertajam lagi agar warga NU yang berada di legislatif, baik pusat maupun daerah, diberi masukan oleh NU mengenai keadaan sebenarnya. Memang tampaknya kader-kader kita belum memiliki kepekaan. Mereka hanya memikirkan angka-angka, mutasi angka dari satu sektor ke sektor yang lain, tanpa menyadari bahwa di belakang angka itu ada sebuah potensi masyarakat yang harus diperhatikan. Inilah yang ke depan perlu kita tegaskan. Itu tidak cukup hanya di tingkat PB, tetapi juga PW, PC, dan seterusnya.

Ada rumor kecil-kecilan yang menghendaki NU kembali menjadi partai politik. Pandangan Pak Bagdja sendiri tentang Khittah itu bagaimana?

Sepanjang yang saya ikuti dalam proses ber-NU, saya kira keinginan semacam itu kecil. Suara itu ada, tapi kecil. Mungkin itu hanyalah letupan dan respons dari hiruk-pikuk situasi politik, baik pemilihan legislatif atau pun pemilihan presiden. Mungkin mereka

melihat kegagalan-kegagalan atau tepatnya belum mencapai tujuan yang diharapkan. Itu kemudian ditarik menjadi bahwa NU harus begini dan begitu. Menurut saya, sebagai sebuah letupan, kegagalan, kekecewaan, saya kira tidak masalah. Tapi, dilihat dalam perspektif ke depan, saya lebih cenderung agar NU menjadi sebuah organisasi sosial keagamaan yang bertugas memberdayakan umat dan tetap memegang Khittah 1926. Hanya saja, ke depan, kita memerlukan adanya aturan main yang lebih lengkap agar warga NU ketika kelak menyikapi berbagai persoalan, termasuk persoalan politik, tidak saling menyalahkan karena berbeda tafsir tentang pegangan-pegangan itu. Misalnya, seseorang yang menjadi caleg dan calon eksekutif ketika melakukan itu, di satu sisi ada yang mengatakan melanggar Khittah, dan di sisi lain ada yang mengatakan tidak. Ke depan, perlu ada aturan normatif yang

menjadi pegangan bagi seluruh pengurus NU dari pusat hingga daerah agar ketika menyikapi kenyataan seperti itu tidak menyebabkan NU goyah. Dengan demikian, tarikan-tarikan politik yang mungkin akan muncul lima tahunan ini akan disikapi lebih dewasa lagi oleh warga NU.

Apakah draft itu sudah disiapkan oleh panitia muktamar?

Ya, kita sudah siapkan. Dari diskusi dan halaqah pra-muktamar, kita menyerap masukan-masukan untuk memberikan aturan tentang itu, meskipun aturan yang baku, misalnya, khittah telah ada syarahnya, yaitu hasil Munas Lampung. Bisa jadi, syarah itu kurang lengkap, nanti kita beri syarah baru atau syarah yang lebih sempurna. Kita menampung seluruh saran-saran, baik dari struktural maupun kultural, agar bisa memberikan kontribusi langsung pada panitia materi. ■

